

PENGUNAAN DANA DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

USE OF VILLAGE FUNDS AND ITS IMPLICATIONS ON VILLAGE BUILDING INDEX (IDM)

Netra Ekawati,* Asdi Agustar, Devi Analia

Program Magister Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

*Email korespondensi: netra1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui implikasinya terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan memilih 3 desa yang tingkat kemajuannya berbeda sebagai kasus. Pada setiap desa yang dijadikan kasus dilakukan interview mendalam terhadap informan dan untuk mendapatkan angka IDM penulis menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan statistik diskriptif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian didapatkan, bahwa penggunaan dana desa mulai dari perencanaan penggunaan sampai dengan pelaporan penggunaan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknisnya, belum sepenuhnya menerapkan prinsip tatakelola keuangan yang baik. Selain itu, aspek penggunaan secara tertib terutama konsistensi penggunaan sesuai dengan rencana strategis nagari sering menjadi kurang diperhatikan. Selanjutnya Implikasi Pemanfaatan Dana Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan dampak positif pada nagari, pelaksanaan pemanfaatannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Indeks Desa Membangun

ABSTRACK

This study aims to determine the management and utilization of Village Funds in West Pasaman Regency and determine its implications for increasing the Nagari Village Development Index (IDM) in West Pasaman Regency. The research uses a case study method by selecting 3 villages with different levels of progress as cases. In each village that was used as a case, in-depth interviews were carried out with informants and to get the IDM number the authors used secondary data. Data analysis was carried out using descriptive statistics followed by qualitative analysis. The results of the study showed that the use of village funds, from planning the use to reporting the use as regulated in the technical instructions, had not fully implemented the principles of good financial management. In addition, the aspect of orderly use, especially the consistency of use in accordance with the nagari's strategic plan, often gets less attention. Furthermore, the implications of using Village Funds for increasing the Village Building Index (IDM) have had a positive impact on the nagari, the implementation of its utilization has been carried out in accordance with existing regulations.

Keywords: Management, Village Funds, Building Village Index

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dikenal dengan UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Untuk operasionalisasi dari ketentuan UU Desa tersebut sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Re-publik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2016).

Berdasarkan laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tahun 2019 di dapatkan jumlah alokasi untuk Dana Desa dalam APBN meningkat dari tahun ke tahun. Adanya Dana Desa, secara nasional memberikan dampak yang sangat positif pada pembangunan desa. Data yang disampaikan Presiden Republik Indonesia menyebutkan menurunkan angka kemiskinan dua kali lipat dibandingkan di kota. Seandainya 1,2 juta penduduk di desa bisa keluar dari kemiskinan. Selain itu, juga terjadi perbaikan infrastruktur, lebih kurang 231.700 kilometer jalan desa telah dibangun di 74 ribu desa yang tersebar di seluruh Tanah Air. Sejumlah 22 ribu Kepala Keluarga juga telah mendapat akses air. Selain itu ada juga tambatan perahu kecil sebanyak 6.312 unit. PAUD yang dibangun 59.640 unit, Polindes sebanyak 11.599 unit, dan pasar desa sebanyak 10.480 unit. Pesatnya pembangunan desa tentu saja diharapkan mampu merubah kondisi desa yang berimplikasi terhadap status desa.

Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT menyebutkan, jumlah Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) juga mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, Desa Sangat Tertinggal berkurang menjadi 5.332, Desa Tertinggal turun menjadi 15.934. Sebaliknya Desa Berkembang meningkat menjadi 40.029 desa, Desa Maju naik menjadi 11.912 dan Desa Mandiri bertambah

menjadi 1.741 desa. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa Dana Desa telah membantu menurunkan jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal.

Namun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, khususnya aspek pembinaan dan aspek pengawasan. Permasalahan pada aspek pembinaan antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa.

Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu dari 122 daerah tertinggal di seluruh Indonesia (Perpres No. 131 Tahun 2015). Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2020 menunjukkan, 10,5% (2 nagari) dari 19 nagari yang ada berada dalam kategori tertinggal (SK Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Re-publik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2015 – 2019), Jumlah Dana Desa untuk Kabupaten Pasaman Barat selalu memperlihatkan trend kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah Dana Desa sebesar Rp 8.728.910.000, meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 19.617.110.000. Pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp 25.253.383.000, pada tahun 2018 sebanyak Rp 35.839.479.000 dan pada tahun 2019 meningkat lagi mencapai Rp 47.238.491.000. (TPP Kabupaten Pasaman Barat, 2019).

Dengan demikian bila dilihat data tahun 2019, rata-rata setiap nagari menerima lebih dari 2 milyar rupiah. Jumlah Dana Desa tersebut bila dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, maka menjadi pendorong yang sangat potensial untuk laju pembangunan di setiap nagari di

Kabupaten Pasaman Barat. Se-lanjutnya status nagari meningkat, dan yang sangat penting tidak adalagi nagari yang masuk kategori tertinggal

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti apakah dana desa tersebut sudah dikelola dengan baik dan apakah penyaluran dana desa tersebut sudah tepat sasaran, sehingga akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasa-man Barat. Nagari yang dijadikan kasus adalah Nagari Katiagan mewakili nagari tertinggal, Nagari Batahan mewakili nagari berkembang dan Nagari Ujung Gading me-wakili nagari maju. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus. Subjek penelitian (in-forman kunci) yang digunakan adalah wali nagari, Badan Perwakilan Nagari (BAMUS Nagari / BPD) dan kepala urusan keuangan nagari (Bendahara Nagari). Untuk menge-tahui penggunaan dana desa dan implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pasaman Barat akan dikumpulkan data berupa : melengkapi data primer juga dikumpulkan data sekunder

Data yang didapatkan dianalisis melalui tiga tahapan setelah data lapangan berhasil dikumpulkan yakni pertama; dilakukan re-duksi data (*reduction data*), kedua; *data display*, dan ketiga; *conslusion drawing/veri-fication* (Sugiyono, 2012). Agar hasil kajian memiliki derajat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi dan dapat dipertanggungjawab-kan terutama oleh penulis selaku instrumen pokok dalam penelitian ini, maka di lakukan triangulasi data. Hasilnya kemudian diguna-kan untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti secara faktual dan objektif sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

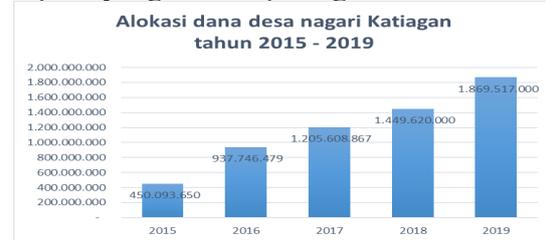
HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Nagari Katiagan Kecamatan Kinali sebagai Nagari Tertinggal

Nagari Katiagan Mandiangin dihuni 3.771 jiwa, laki-laki 1792 jiwa dan pe-rempuan 1979 jiwa dengan 1093 Kepala Keluarga (KK). Dari 1093 KK yang ada dinagari Katiagan 48 KK merupakan kepala keluarga perempuan dan 896 KK merupakan keluarga miskin sekitar 81% masyarakat nagari katiagan merupakan keluarga miskin, 19% masyarakat Katiagan bermata penca-harian petani, buruh pabrik, PNS dan pe-

gawai swasta. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nagari Katiagan terletak di daerah pesisir pantai, yang cukup terisolir dengan jarak dari pemerintahan nagari ke kecamatan di Kinali sekitar 35 Km, ke Ibu Kota Kabupaten di Simpang Ampek sekitar 50 Km dan ke Ibu Kota Propinsi di Kota Padang sekitar 195 Km.

Berdasarkan data yang didapat Dana Desa yang dianggarkan pada nagari Ka-tiagan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Alokasi Dana Desa Nagari Katiagan Tahun 2015 - 2019

Namun jika dilihat dari hasil penguku-ran Indeks Desa Membangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tidak mengalami perubahan tetap pada kategori desa tertinggal, berubah pada tahun 2020, dari tertinggal menjadi berkembang. Posisinya yang strategis di pesisir pantai sebenarnya sangat menguntungkan Nagari Katiagan karena kaya akan potensi perikanan laut. Sayangnya, hal itu tidak berdampak terhadap peningkatan perekonomian masya-rakat. Hal ini terlihat dari status IDM yang selalu menempati posisi nagari tertinggal sejak tahun 2016 sampai tahun 2018.

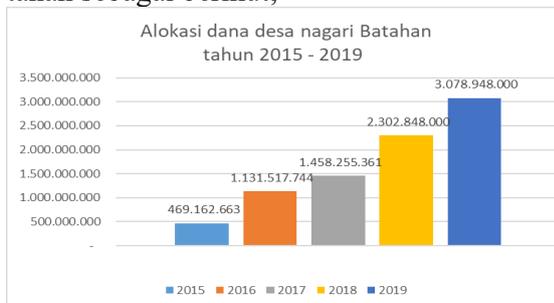
Profil Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Nagari Berkembang

Nagari Batahan berpenduduk 19.360 jiwa (2020) terdiri dari 9.476 laki-laki dan 9.884 perempuan, serta 4.857 rumah tangga. Dilihat dari mata pencaharian penduduk, mayoritas penduduk nagari Batahan bermata pencaharian sebagai petani, sekitar 50% dari jumlah penduduk yang ada. Sementara yang bekerja sebagai pedagang 30%, sedangkan sisanya bekerja sebagai pegawai swasta dan pegawai negeri (20%).

Keadaan ekonomi masyarakat nagari Batahan secara umum bertumpu pada sektor pertanian terutama sub sektor perkebunan, dengan komoditas unggulan karet, kakao, kelapa sawit, padi sawah, dan jagung. Ko-moditas

unggulan inilah yang menjadi pe-nggerak perekonomian masyarakat. Peningkatan ekonomi sangat ditentukan oleh transaksi ekonomi di suatu kawasan, terutama ketersediaan pasar, untuk itulah Nagari Batahan memfokuskan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat nagari, pasar menjadi prioritas utama, hingga tahun 2016 ini Prasarana perekonomian yang ada di pasar yang terus dalam pengelolaan baik dari segi jumlah prasaran maupun segi kelem-bagaan pasar dan manajemen pasar, saat ini di Nagari Batahan tepatnya 3 Pasar yaitu pasar Jorong Silayang, pasar nagari di Kampong Baru dan pasar Nagari Silaping, dari 3 pasar ini pasar nagari di Silaping sudah mempunyai sarana terlengkap, dimana kepemilikan tanah bangunan pasar luas ± 12.000 m yang berasal dari penyerahan ninik mamak untuk lokasi bangunan pasar nagari. Potensi yang ada di Nagari Batahan adalah berupa Perkebunan, Sawah, Ternak, Pertambangan Kehutanan, Kayu dan hasil hutan non Kayu

Dana Desa yang diterima Nagari Batahan sebagai berikut;



Gambar 2. Alokasi Dana Desa Nagari Batahan Tahun 2015 – 2019

Dari data di atas, Dana Desa yang diterima berdasarkan klasifikasi desa mengalami perubahan nominal setiap tahunnya. Dana yang diterima setiap desa bisa dikategorikan cukup besar. Dengan dana tersebut tentunya desa sudah mampu mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Dalam hal ini untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Sementara dilihat dari hasil pengukuran Indeks Desa Membangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tidak mengalami perubahan selalu dalam kategori berkembang.

Profil Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Sebagai Nagari Maju

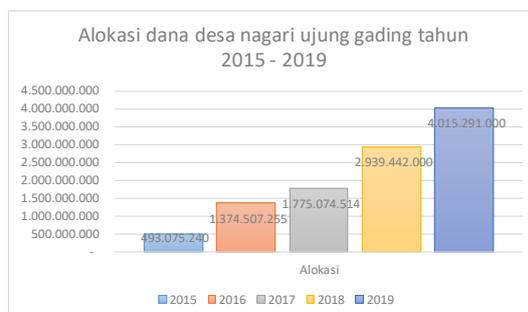
Nagari Ujung Gading berpenduduk 49.764 jiwa dan 10.821 rumah tangga (2020), terdiri dari 24.867 laki-laki dan 24.897 perempuan. 40 % dari penduduk masyarakat Ujung Gading mata pencaharaian petani, 17% PNS dan pegawai swasta, 15% buruh / tukang, 23% pedagang / wiraswasta dan 5% pensiunan.

Nagari Ujung Gading sumber utama penghasilan masyarakat adalah bertani, hasil pertanian meliputi kelapa sawit, jagung, karet dan kakao, selain hasil bertani, masyarakat nagari ujung gading sebagai besar pedagang, dibuktikan dengan Pasaman Barat arah utara pusat perbelanjaan ada dipasar Ujung Gading dan beberapa mini market yang sudah lengkap yang dikunjungi dari berbagai daerah yang ada di sekitar Pasaman Barat arah utara dan dari berbagai karyawan perusahaan perkebunan yang ada di daerah bagian utara pusat perbelanjaannya ke pasar Ujung Gading, disini dapat dilihat nilai tukar uang cukup tinggi, dan dapat meningkatkan per-ekonomian masyarakat Nagari Ujung Gading.

Nagari Ujung Gading sudah memiliki media informasi melalui Media layanan pengaduan masyarakat di nagari Ujung Gading melalui website: <http://ujunggading.pasamanbaratkab.go.id/>, melalui puskesmas Nagari dan kotak pengaduan/Saran. Publikasi dan Transparansi Informasi Kegiatan di Nagari Ujung Gading melalui Baliho dan Videotrone.

Dana Desa yang dianggarkan pada Nagari Ujung Gading mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Gambar 3. Alokasi Dana Desa Nagari Ujung Gading Tahun 2015- 2019



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dana desan tiap tahunnya terus meningkat, Sementara dilihat dari hasil

pengukuran Indeks Desa Membangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tidak mengalami perubahan selalu dalam kategori Maju.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam men-capai tujuan tertentu (Thomas, 2013). Se-lanjutnya menurut Arif (2007) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan desa. Secara rinci dapat dijelaskan asas penge-lolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Transparan,
- b. Akuntabel,
- c. Partisipatif,
- d. Tertib dan disiplin anggaran,

Berdasarkan penelitian yang telah dilak-sanakan didapatkan hasil pengelolaan dana desa seperti tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa

No	Nagari	Perencanaan				Pelaksanaan		
		Transparansi	Akuntabel	Partisipatif	Tertib dan disiplin	Transparansi	Akuntabel	Partisipatif
1	Katiagan	Baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Baik	Kurang baik
2	Batahan	Baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Baik	Kurang baik
3	Ujung Gading	Baik	Baik	Baik	Kurang baik	Baik	Baik	Baik

Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa

No	Nagari	Penatausahaan				Pelaporan dan Pertanggungjawaban			
		Transparansi	Akuntabel	Partisipatif	Tertib dan disiplin	Transparansi	Akuntabel	Partisipatif	Tertib dan disiplin
1	Katiagan	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Baik	Baik	Kurang baik	Kurang baik
2	Batahan	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Kurang baik	Baik	Baik	Kurang baik	Kurang baik
3	Ujung Gading	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari ketiga nagari lokasi penelitian, dari hasil penelitian peneliti nagari yang baik dalam pengelolaan keuangan nagari mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dapat pada nagari ujung gading karena diukur dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib

dan disiplin memberikan hasil dan nilai yang baik, sedangkan nagari batahan dan katiagan dalam pengelolaan keuangan nagari mulai dari perencanaan sampai ke pertang-gungjawaban masih kurang baik, namun ada juga beberapa azaz dalam pengelolaan pada dua nagari ini yang di nilai baik, semua tahapan pengelolalan keuangan nagari tetap dilaksanakan walaupun tidak seperti yang yang diharapkan. Nagari selalu berupaya semaksimal mungkin bagaimana pengelolaan ini lebih baik dan sesuai dengan aturan yang ada

Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun menjadi to-lok ukur pemerintah pusat dalam mengukur perkembangan desa. Oleh karena itu setiap tahun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu melaksanakan pengukuran indeks desa membangun kepada seluruh desa termasuk Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Pengukuran ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, tingkat Keca-matan, Kabupaten dan tingkat Propinsi. Pengukuran ini juga melibatkan banyak pihak mulai dari perangkat nagari sebagai penyedia data, pendamping desa sebagai petugas pendata dan menginput data, pihak Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi sebagai pihak yang memverifikasi dan menetapkan data. Hasil Indeks Desa Membangun (IDM ditetapkan melalui keputusan Dirjen Pem-bangunan dan Pemberdayaan Desa dan dii dipublikasikan kepada seluruh pihak dan masyarakat melalui website www.idm.kemendesa.go.id

Tabel 3. Status Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Indeks Desa Membangun (Tahun 2016- 2020)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat perkembangan nagari yang diukur dengan Indeks Desa Membangun maka di Kabupaten Pasaman Barat terdapat Nagari yang mengalami peningkatan, penurunan maupun tetap. Sedangkan untuk Nagari yang menjadi lokasi penelitian terdapat 1 (satu) Nagari yang mengalami peningkatan yaitu Nagari Katiagan sedangkan untuk Nagari Batahan dan Nagari Ujung Gading tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dapat digambarkan kondisi nagari yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 4. Status Nagari Katiagan, Nagari Batahan dan Nagari Ujung Gading Berdasarkan IKS, IKE dan IKL Tahun 2016 – 2020

No	Nagari	Status IDM			
		2016	2018	2019	2020
1	Aia Bangih	Maju	Maju	Maju	Maju
2	Desa Baru	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
	Batahan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
3	Parik	Maju	Berkembang	Berkembang	Berkembang
4	Sungai Aua	Maju	Maju	Maju	Maju
5	Ujung Gading	Maju	Maju	Maju	Maju
6	Muaro Kiawai	Berkembang	Maju	Maju	Maju
	Rabi Jonggor	Tertinggal	Maju	Maju	Maju
7	Kajai	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang
	Talu	Maju	Maju	Maju	Maju
8	Sinruik	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Maju
	Lingkuan Aua	Maju	Maju	Maju	Maju
	Aua Kuniang	Berkembang	Maju	Maju	Maju
9	Aia Gadang	Berkembang	Berkembang	Maju	Maju
	Koto Baru	Maju	Maju	Maju	Maju
10	Kapa	Berkembang	Maju	Maju	Maju
	Sasak	Maju	Berkembang	Maju	Maju
11	Katiagan	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang
	Kinali	Maju	Berkembang	Maju	Maju

No	Tahun	Kecamatan	Nama Nagari	IKS	IKE	IKL
1	2016	Kinali	Katiagan	0,5718	0,4163	0,6665
	2018			0,57143	0,41667	0,66667
	2019			0,6343	0,3833	0,7333
	2020			0,6343	0,3500	0,8667
2.	2016	Ranah Batahan	Batahan	0,6934	0,6934	0,46667
	2018			0,73143	0,70000	0,46667
	2019			0,7886	0,7676	0,4667
	2020			0,8229	0,7333	0,5333
3	2016	Lembah Malintang	Ujung Gading	0,7344	0,7344	0,40000
	2018			0,92000	0,81667	0,40000
	2019			0,8743	0,8167	0,5333
	2020			0,8971	0,8833	0,6000

Sumber: Keputusan Dirjen PPMD, Kemendes, PDDT 2016-2020

Secara umum dari hasil pembahasan peneliti menyatakan masih adanya pemerintahan nagari yang belum mempedomani aturan penggunaan dana desa, seperti yang diatur pada peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia. Peneliti melihat juga pada saat perencanaan pemerintah nagari tidak mempedomani hasil pengukuran IDM tahun lalu, sehingga bila dibandingkan prioritas yang direkomendasikan IDM tidak terlaksana karena nagari masih punya RPJM yang harus diselesaikan. Disamping itu rekomendasi IDM yang harus dilaksanakan di nagari ada yang tidak sesuai/ belum dibutuhkan nagari, dan bukan menjadi kewenangan nagari. Perhitungan/pengukuran terhadap fasilitas masing-masing indeks diukur dari kantor nagari/kantor desa, kita mengakui luas wilayah satu desa di Kabupaten Pasaman Barat sama dengan luas satu kecamatan, sehingga saat pengukuran IDM di Pasaman Barat berbeda dengan nagari lain di Sumatera Barat.

Dari segi penguatan ekonomi terkait permodalan BUMNAG, nagari juga masih enggan menggangarkannya karena masih menganggap Bumrag tidak bagian dari lembaga nagari.

Kaitan Dana Desa dengan IDM Spesifik 3 Lokasi

Dari hasil penelitian dapat dilihat berdasarkan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia, prioritas penggunaan dana

desa sudah dijalan sebagaimana mesti-nya, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di antaranya :

1. Nagari Katiagan adalah kategori desa tertinggal. Melihat hasil yang didapat sarana prasarana dasar sebagian telah terpenuhi, yang belum pada transportasi, informasi dan komunikasi yang perlu diperhatikan kedepannya oleh pemerintah nagari harus ditingkatkan dan dianggarkan di APB nagari, sedangkan pada bidang pemberdayaan lebih kepada peningkatan kapasitas aparatur ini juga belum prioritas, seharusnya lebih kepada peningkatan ekonomi, pembentukan bumdes dan pembentukan usaha ekonomi kelompok/ warga. ini agar menjadi perhatian oleh pemerintah nagari supaya dianggarkan di APB nagari. dari beberapa indikator penilaian IDM ada yang sebagian tidak menjadi kewenangan nagari, sehingga sulit dalam mengukurnya, dari hasil pengukuran IDM selama lima tahun, pada tahun ke lima status nagari katiagan dari tertinggal menjadi berkembang,
2. Nagari Batahan adalah kategori desa berkembang. Melihat hasil yang didapat sarana prasarana sosial dasar sebagian telah terpenuhi, yang belum pada informasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan dan dianggarkan pada APB nagari, sedangkan pada bidang pemberdayaan pada peningkatan kapasitas terkait penguatan usaha peningkatan ekonomi sudah dimulai, walaupun hanya sebatas formalitas, untuk peningkatan kapasitas harus identifikasi apa potensi yang sesuai di nagari, sedangkan penguatan bumdes dan penyertaan modal belum sama sekali dianggarkan, ini menjadi perhatian pada pemerintah nagari dan dianggarkan pada APB nagari. Dari hasil pengukuran IDM selama lima tahun tidak mengalami kenaikan status, namun indeks masing – masing berangsur naik, ini juga berpengaruh dengan jumlah jorong dinagari sebanyak 26 jorong, sedangkan perhitungan dalam pengukuran IDM diukur dari kantor desa / kantor nagari, sehingga sulit bila dibandingkan dengan semua fasilitas yang harus ada di masing-masing kejurong-an.
3. Nagari ujung gading dengan kategori nagari maju sejak pengukuran IDM tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak mengalami kenaikan status, dilihat dari nilai idm pada

iks dan ike cukup baik , sedang pada ikl yang sangat rendah jika dihitung rata-rata ketiga indeks tidak mengalami perubahan, dilihat dari penggunaan dana desa tahun 2015-2019 sudah cukup baik , namun pada penggaran pada kegiatan lingkungan sangat minim, untuk penyusunan APB nagari harus menjadi perhatian pemerintah nagari bila menjadi kewenangan nagari, dan ada sebagian prioritas di dalam penilaian indikator IDM tidak kewenangan nagari, sehingga sulit bila harus dipaksakan, yang menjadi permasalahan yang mendasar adalah lingkungan, dimana dengan kepadatan penduduk berakibat pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah dan drainase yang sering tersumbat dan mengakibatkan banjir, sehingga bila diukur indeks ketahanan lingkungan yang sering mengalami kendala.

SIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di nagari sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban pada nagari Ujung Gading diukur dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin memberikan hasil dan nilai yang baik, sedangkan Nagari Batahan dan Katiagan dalam pengelolaan keuangan nagari mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban masih kurang, namun ada juga beberapa azas dalam pengelolaan pada nagari Batahan dan Katiagan di nilai baik, semua tahapan pengelolaan keuangan tetap dilaksanakan, namun sumber daya manusia sangat menentukan dalam suatu pengelolaan dan pemanfaatan dinagari

Selanjutnya Implikasi Pemanfaatan Dana Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan dampak positif pada nagari, pelaksanaan pemanfaatannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, namun status dari 3 nagari yang jadi lokasi penelitian yang berubah pada Nagari Katiagan pada tahun ke 5 dana desa dari tertinggal menjadi berkembang, sedangkan Nagari Batahan dan Ujung Gading tidak ada perubahan status, melihat banyaknya dimensi dan indikator yang menjadi penunjang IDM, membuat dana desa tidak bisa dianggarkan pada setiap dimensinya, dan ada beberapa dimensi dan indikator yang bukan kewenangan desa dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu pe-

merintah nagari serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Leon. 2018. *Dampak Dana Desa Terhadap Peningkatan Status Desa*. [Makalah]. Surakarta. Program Studi Ekonomi Pembangunan Transfer Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret.
- [BAKN DPR RI] Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2018*. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Jakarta.
- [KEMENDES] Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2016. *Laporan Akhir Kegiatan Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan (Lingkup Desa)*. Jakarta.
- Gani, Alifia Octavia A. dkk. 2020. *Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. [Jurnal]. Makassar. Fakultas Ilmu Ekonomi. Universitas Muslim Indonesia.
- Gusti, Yenni. dkk. 2020. *Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan*. [Jurnal]. Padang. Universitas Andalas.
- Juliana, Endang. 2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. [Skripsi]. Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Jumiadin dan Sunarwan Asuhadi. 2018. *Kajian Aspek Lingkungan Hidup pada Pengukuran Pembangunan Desa di Kabupaten Wakatobi*. [Jurnal].
- Muhtarom, Nurhadi Kusuma, dan Eri Purwanti. 2018. *Analisis Indeks Desa Membangun untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*. [Jurnal].
- Nain, Umar. 2019. *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.